



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No. SL-020/PMH/UPM/VI/2026

Issue/Revisi

Tgl Berlaku 2026

Halaman

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A
Jabatan Dosen Pembimbing
Program Studi Magister Hubungan Interansional
NIP 206070120

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

DIPLOMASI KEISLAMAN MASJID ISTIQLAL TERHADAP TIONGKOK PADA ERA
NASARUDDIN UMAR PERIODE 2019-2025

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap HALAH FADHILAH BUKHORI
Jenjang S2
Program Studi HUBUNGAN INTERNASIONAL
NIM 223231022

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 26 Juni 2026

Penelaah,

Dr. Rizki Damayanti, S.IP., M.A

NIP: 206070120

Nama Formulir:

**Surat Pernyataan
dan Validasi**

No.

FR-002/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap HALAH FADHILAH BUKHORI
Jenjang S2
Program Studi HUBUNGAN INTERNASIONAL
NIM 223231022
Alamat JL. PALAD RAWA KUNUNG RT 06 RW 07 NO 18 PULO GEBANG
CAKUNG JAKARTA TIMUR 13950

** coret yang tidak perlu*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

DIPLOMASI KEISLAMAN MASJID ISTIQLAL TERHADAP TIONGKOK PADA ERA
NASARUDDIN UMAR PERIODE 2019-2025

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 25 Juni 2026
Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap: Halah Fadhilah
NIM: 223231022

**Diplomasi Keislaman Masjid Istiqlal Melalui *The Voice Of Istiqlal* Terhadap Tiongkok
Pada Era Nasaruddin Umar (2019–2025)**

**Halah Fadhilah Bukhori
223231022
Universitas Paramadina**

Abstract

This study aims to analyze the implementation and effectiveness of Islamic diplomacy conducted by the Istiqlal Mosque through The Voice of Istiqlal (VoIst) division as a public diplomacy actor toward China during the leadership of Nasaruddin Umar (2019–2025). Grounded in the transformation of contemporary diplomacy involving non-state actors as soft power instruments, this research uses a qualitative descriptive-analytical approach. Data were gathered through interviews with key figures, including the Grand Imam of Istiqlal and the Director of VoIst, alongside an extensive literature review. The theoretical framework incorporates constructivism, soft power, and public diplomacy.

Findings indicate that VoIst serves as a strategic actor bridging long-term collaborations in education and culture—such as the "China Space" initiative—while digital platforms act as publication tools to disseminate moderate Islam narratives to the public. While effective in building mutual understanding and managing sensitive religious issues non-confrontationally, the diplomacy faces challenges such as strict digital media regulations in China and limited structural impact on bilateral policies

Keywords: Islamic diplomacy, Istiqlal Mosque, The Voice of Istiqlal, soft power, digital diplomacy, Indonesia–China relations.

Pendahuluan

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, praktik diplomasi telah mengalami perubahan fundamental yang menggeser dominasi aktor negara sebagai aktor utama dan satu-satunya pemegang otoritas dalam hubungan antarnegara. Diplomasi saat ini difungsikan secara lebih luas melalui keterlibatan aktor non-negara, seperti lembaga pendidikan, institusi keagamaan, dan masyarakat sipil. Pergeseran ini membawa konsep diplomasi publik dan diplomasi digital ke ruang strategis, di mana agama tidak lagi dipandang sebagai hanya condong pada masalah privat, melainkan juga sebagai alat *soft power* yang mampu mempengaruhi preferensi aktor lain melalui daya tarik nilai dan budaya tanpa adanya unsur keterpaksaan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, model “Islam Nusantara” yang moderat, toleran, dan adaptif terhadap kearifan lokal menjadi aset diplomasi yang tak ternilai dalam upaya melawan stigma negatif radikalisme dan Islamophobia di panggung dunia (Damayanti, 2025).

Masjid Istiqlal sebagai masjid nasional yang ikonik dan merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara, memegang posisi kuat dalam arsitektur diplomasi keislaman Indonesia. Secara historis, Masjid Istiqlal didirikan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa dan representasi identitas Islam Indonesia yang inklusif. Letaknya yang berdampingan dengan Gereja Kathedral, menunjukkan bahwa Istiqlal sejak awal berdirinya sudah memegang pada prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” dan komitmennya terhadap kerukunan antarumat beragama (NU Online, 2019). Namun, peran Istiqlal mengalami reposisi yang jauh lebih progresif pada era kepemimpinan Imam Besar Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar dengan merancang visi “*New Istiqlal*”, yang artinya Istiqlal ditransformasikan menjadi pusat peradaban Islam moderat yang berorientasi global dan professional, melampaui fungsi tradisionalnya sebagai rumah ibadah nasional (Arifah & Fabian, 2025).

Langkah nyata dari transformasi Istiqlal menjadi lebih strategis adalah terbentuknya divisi *The Voice of Istiqlal* (VoIst). VoIst merupakan divisi yang berada di bawah Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI), berperan sebagai aktor diplomasi publik dan menjembatani hubungan Istiqlal dengan negara-negara lain melalui kolaborasi jangka panjang di bidang pendidikan, kebudayaan, dan dialog lintas iman. Dalam operasionalnya, VoIst memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, YouTube, dan situs web sebagai sarana publikasi strategis. Dengan melalui media tersebut, VoIst menyebarluaskan narasi moderasi beragama dan

mempromosikan keberhasilan kerja sama internasional yang telah dicapainya kepada masyarakat luas, baik domestik maupun mancanegara.

Salah satu fokus diplomasi yang dilakukan oleh VoIst adalah terhadap Tiongkok. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok telah berkembang sangat baik, terutama di sektor ekonomi dan investasi infrastruktur. Namun, di balik kedekatannya, terdapat dinamika kompleks terkait sensitivitas isu keagamaan, khususnya mengenai kondisi masyarakat Muslim Uyghur di wilayah Xinjiang. Isu ini sering menjadi titik konflik dalam diplomasi global yang memicu perdebatan mengenai hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Bagi Indonesia, menyikapi isu Xinjiang menuntutnya untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab moral sebagai negara mayoritas Muslim dengan kepentingan strategis nasional sebagai mitra ekonomi Tiongkok (Oktavia, 2023).

Dalam situasi yang dilematis tersebut, jalur diplomasi formal negara seringkali menghadapi keterbatasan dalam menyikapinya karena harus mematuhi prinsip *non-interference*. Maka, peran Masjid Istiqlal melalui VoIst hadir untuk mengisi ruang kosong melalui pendekatan diplomasi masyarakat (*society-driven diplomacy*) yang bersifat non-konfrontatif, dengan membangun kepercayaan (*trust-building*) melalui komunikasi lintas budaya, pendidikan, dan iman. Salah satu bukti nyatanya adalah adanya ruang “*China Space*” yang berada di area Perpustakaan Istiqlal, menjadi ruang kolaborasi pendidikan dan budaya yang memfasilitasi pelatihan bahasa Mandarin dan pertukaran informasi lintas budaya. Interaksi ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama (*mutual understanding*) dan mengklarifikasi mispersepsi global melalui interaksi *people-to-people* yang langsung dan inklusif.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun aktivitas diplomasi melalui VoIst telah menarik perhatian besar baik dari pengunjung internasional maupun internal, kajian akademik mengenai peran spesifik institusi masjid sebagai aktor diplomasi digital masih sangat terbatas. Sebagian besar literatur masih didominasi oleh peran organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah. Periode 2019-2025 menjadi fase krusial untuk dievaluasi karena mencakup masa transformasi kepemimpinan di Masjid Istiqlal yang beriringan dengan penguatan intensitas hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok. Namun, efektivitas diplomasi ini tetap menghadapi tantangan struktural, seperti regulasi media digital yang ketat di Tiongkok

yang membatasi masyarakatnya untuk menjangkau konten-konten di luar Tiongkok seperti VoIst secara langsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diplomasi keislaman Masjid Istiqlal melalui divisi VoIst terhadap Tiongkok selama periode 2019-2025. Kajian ini menggunakan perspektif konstruktivisme untuk membedah bagaimana identitas Islam moderat dikonstruksi melalui interaksi sosial, serta teori *soft power* dari Joseph Nye dan konsep diplomasi publik sebagai kerangka analitis. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada literatur hubungan internasional mengenai peran agama sebagai alat perdamaian serta mengevaluasi sejauh mana diplomasi berbasis nilai agama ini mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai rujukan Islam moderat dunia di tengah kompleksitas hubungannya dengan Tiongkok.

Perspektif Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional

Dalam menganalisa diplomasi keislaman Masjid Istiqlal, perspektif konstruktivisme memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana realita global tidak hanya dibentuk oleh *hard power* atau kekuatan militer dan ekonomi, tetapi dibentuk juga oleh ide, norma, dan identitas yang dibangun melalui interaksi sosial. Konstruktivisme menekankan bahwa kepentingan aktor negara tidak bersifat tetap, tetapi diciptakan melalui proses komunikasi dengan aktor lain (Theys, S., 2018). Seperti yang menjadi penelitian kali ini yaitu Masjid Istiqlal yang tidak hanya dipandang sebagai bangunan fisik atau tempat ibadah, tetapi juga sebagai aktor yang mengonstruksi identitas “Islam Indonesia” yang moderat, toleran, dan damai di mata dunia internasional.

Melalui *The Voice of Istiqlal* (VoIst), proses diplomasi ini dipahami sebagai upaya membentuk struktur normatif baru dalam hubungan Indonesia dengan Tiongkok, di mana isu keagamaan dikelola melalui dialog budaya untuk membangun pemahaman bersama (*mutual understanding*).

Teori *Soft Power* (Joseph Nye)

Sebagai alat diplomasi non-negara, strategi Masjid Istiqlal sangat relevan dengan teori *soft power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye. *Soft power* diartikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi preferensi pihak lain melalui daya tarik nilai, budaya, dan kebijakan tanpa adanya unsur paksaan.

Nye mengidentifikasi tiga sumber utama dalam *soft power* ini yaitu budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri yang dianggap bermoral (Joseph S. Nye, Jr., 1990). Masjid Istiqlal memanfaatkan kredibilitas simboliknya sebagai masjid nasional terbesar di Asia Tenggara untuk menarik minat publik internasional, dan melalui Voist, nilai-nilai Islam moderat dikemas ke dalam ruang digital secara transnasional, memungkinkan pembentukan opini publik internasional yang positif terhadap Indonesia tanpa melalui jalur diplomasi formal yang kaku.

Konsep Diplomasi Publik dan Diplomasi Digital

Diplomasi publik merupakan praktik hubungan internasional yang berfokus pada interaksi langsung dengan masyarakat asing untuk membentuk citra positif negara di dunia global. Dalam era globalisasi, peran aktor non-negara seperti lembaga keagamaan menjadi setara dengan aktor negara dalam melakukan pendekatan *people-to-people* (Melissen, J., 2005).

VoIst mewakili Istiqlal memerankan peran strategis sebagai wadah diplomasi publik yang berbasis agama (*faith-based public diplomacy*), di mana pesan-pesan moderasi beragama disampaikan melalui kegiatan pertukaran budaya, pendidikan, dan media digital. Kemudian, diplomasi digital yang dijalankan oleh VoIst memanfaatkan teknologi informasi dalam menyebarkan narasi secara cepat dan luas, dan menembus batasan geografis untuk memengaruhi persepsi publik internasional khususnya Tiongkok mengenai kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dengan tujuan untuk meneliti secara mendalam dinamika, proses, hingga makna di balik

implementasi diplomasi keislaman yang dijalankan oleh Masjid Istiqlal melalui divisi *The Voice of Istiqlal* (VoIst). Metode deskriptif-analitis memungkinkan peneliti menggambarkan realitas kebijakan secara komprehensif dengan fokus pada pemberian makna terhadap aktor-aktor yang terlibat.

Data primer dalam kajian ini dikumpulkan melalui Teknik wawancara terstruktur dengan sejumlah informan kunci yang memiliki otoritas strategis. Informan tersebut meliputi Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Mulyono Lodji, M.Si. sebagai Direktur VoIst, serta Dr. KH. Bukhori Sail Attahiry, Lc., M.A. sebagai Kepala Bidang Peribadatan Masjid Istiqlal yang mendampingi Imam Besar pada kunjungannya ke Tiongkok. Selain itu, peneliti juga mewawancarai perwakilan Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta serta akademisi seperti Budi Sugandi, dan Ararat Konstanian sebagai publik internasional asal Armenia untuk mendapatkan perspektif multidimensi.

Penelusuran data sekunder dilakukan melalui studi pustaka terhadap jurnal akademik, laporan tahunan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI), dokumen VoIst, serta konten digital yang dipublikasikan oleh VoIst selama periode 2019-2025. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengadopsi model Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994), yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan, dan kerangka kerja analisis data kualitatifnya dikenal dengan Model Interaktif (*Interactive Model*). Proses ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran utuh mengenai efektivitas VoIst dalam memeperkuat posisi Indonesia sebagai rujukan Islam moderat dunia melalui hubungan *people-to-people* dengan Tiongkok.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Relasi Islam dan Negara dalam Konteks Tiongkok

Hubungan antara Islam dan negara di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan fenomena yang sangat kompleks dan sering kali menjadi titik sensitif dalam hubungan internasional. Tiongkok sebagai negara dengan populasi Muslim minoritas sekitar 23 juta jiwa (1.7% dari total penduduk) (Hsieh, 2026). Komunitas Muslim di Tiongkok terdiri dari beragam suku bangsa dengan dua kelompok terbesar yaitu etnis Hui yang terkonsentrasi di wilayah barat

laut dan telah terasimilasi secara budaya dengan mayoritas Han, serta etnis Uyghur di wilayah Xinjiang yang memiliki identitas bahasa dan budaya Tukik yang sangat kuat (JIC, 2018).

Secara konstitusional, pemerintah Tiongkok membebaskan setiap warga negara untuk beragama selama aktivitas tersebut tidak mengganggu kenyamanan dan keamanan negara. Namun dalam praktiknya negara memegang kendali penuh terhadap regulasi dan pengawasan organisasi keagamaan guna memastikan bahwa nilai-nilai agama sejalan dengan ideologi Partai Komunis Tiongkok (CCP) dan stabilitas nasional (Lee, 2015).

Dinamika ini menciptakan perbedaan perlakuan yang signifikan antara kelompok Muslim di Tiongkok berdasarkan pada pandangan pemerintah terhadap dampak kelompok tersebut pada ketertiban umum dan stabilitas nasional, seperti etnis Hui yang cenderung dipandang tidak mengancam karena identitas keislamannya lebih bersifat kultural daripada politik, sehingga kehidupannya mampu berdampingan dengan baik dan toleran (Alawi, 2019).

Sebaliknya, komunitas Muslim Uyghur di Xinjiang berada di bawah pengawasan keamanan yang jauh lebih ketat karena adanya kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan separatisme dan ekstremisme yang akan mengakibatkan pada kestabilan dan keamanan nasional. Pemerintah setempat hingga mengimplementasikan arsitektur hukum yang kompleks untuk membatasi ekspresi keagamaan di Xinjiang sebagai bagian dari kampanye anti-ekstremisme, yang kemudian memicu tuduhan serius dari lembaga hak asasi manusia internasional mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan hak individu di wilayah tersebut (Human Rights Watch, 2018).

Bagi Indonesia, kondisi di Xinjiang menciptakan tantangan diplomatik yang nyata. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan basis identitas Islam yang kuat dalam kebijakan luar negerinya. Di sisi lain, Tiongkok merupakan mitra strategis utama Indonesia dalam budaya ekonomi, investasi, dan infrastruktur. Dilema ini menempatkan Indonesia pada posisi yang harus menyeimbangkan antara pembelaan terhadap isu kemanusiaan umat Islam global dengan kepentingan pragmatis menjaga stabilitas hubungan bilateral.

Dalam konteks inilah pendekatan diplomasi formal pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan karena harus menghormati prinsip *non-interference* (tidak mencampuri urusan domestik) yang dipegang teguh oleh Tiongkok. Oleh karena itu, keberadaan aktor non-negara seperti Masjid Istiqlal menjadi sangat strategis dalam menjembatani kesenjangan komunikasi ini. Melalui pendekatan yang bersifat *society-driven* dan non-konfrontatif, Istiqlal mampu menyentuh aspek-aspek yang tidak terjangkau oleh jalur diplomasi resmi (Montville, 2006).

Diplomasi keislaman yang dijalankan bertujuan untuk meluruskan mispersepsi, membangun kepercayaan (*trust-building*), dan memperkenalkan wajah Islam Indonesia yang moderat sebagai alternatif dialog di tengah ketegangan politik global terkait isu Islam di Tiongkok. Dengan memahami akar masalah dalam relasi Islam dan negara di Tiongkok, peran Masjid Istiqlal melalui *The Voice of Istiqlal* (VoIst) dapat dipahami tidak hanya sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai alat *soft power* yang berupaya untuk menciptakan stabilitas melalui jalur kebudayaan dan spritualitas.

Transformasi Masjid Istiqlal dan Peran VoIst sebagai Aktor Diplomasi Publik

Memasuki era kepemimpinan Imam Besar Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar (2019-2025), Masjid Istiqlal mengalami reposisi peran yang sangat fundamental dari sekedar tempat ibadah nasional menjadi pusat peradaban Islam moderat yang berorientasi global. Melalui visi “*New Istiqlal*”, masjid ini ditransformasikan menjadi institusi yang modern, profesional, dan internasional yang aktif terlibat dalam isu-isu sosial, budaya, hingga hubungan antar negara (VoIst, 2023).

Transformasi ini tidak hanya mencakup aspek fisik melalui renovasi besar-besaran, tetapi juga penguatan kapasitas institusional untuk menjadi jembatan perdamaian dan kerukunan antar-manusia secara universal. Kini, Istiqlal tidak lagi dipandang sebagai objek statis dalam sejarah nasional, melainkan sebagai aktor non-negara yang memiliki legitimasi moral dan simbolik untuk melakukan praktik diplomasi keagamaan (*religious diplomacy*) (Raba, 2025).

Salah satu bukti yang konkret dan nyata dari strategi transformasi ini adalah terbentuknya *The Voice of Istiqlal* (VoIst) pada tahun 2023. Berdasarkan temuan penelitian, VoIst memiliki peran strategis sebagai aktor diplomasi publik di bawah naungan Badan Pengelola Masjid

Istiqlal (BPPI). VoIst berfungsi sebagai unit strategis yang bertugas menjembatani kedekatan dan kolaborasi panjang antara Masjid Istiqlal dengan dunia internasional, khususnya melalui jalur *track-two diplomacy*. VoIst juga bergerak lebih aktif sebagai aktor yang menyuarakan misi “*New Istiqlal*” di panggung global, membangun jaringan internasional, serta memperjuangkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan hak asasi manusia.

Dalam arsitektur diplomasi yang dilakukan VoIst adalah VoIst berperan sebagai subjek yang menginisiasi program kerja sama nyata di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berbagai negara dunia yang diwakili oleh Kedutaan Besar yang ada di Jakarta, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, Jepang, dan Singapura. Selain itu, VoIst juga menjadi wadah para pemimpin dan tokoh lintas agama untuk berdialog dalam forum yang diadakan dalam area Masjid Istiqlal. Ditambah, alat diplomasi digital melalui Instagram, situs web dan YouTube dijalankan oleh VoIst sebagai sarana publikasi strategis. Platform digital ini digunakan untuk mempromosikan kegiatan bermanfaat tersebut kepada masyarakat luas dan membentuk persepsi positif dunia terhadap Islam Indonesia yang inklusif.

Dengan demikian, VoIst telah berhasil mengubah citra Masjid Istiqlal menjadi institusi yang tidak hanya kredibel secara spiritual, tetapi juga profesional dalam mengelola hubungan lintas budaya. Melalui sinergi antara tindakan nyata di lapangan dan publikasi yang masif di media digital, VoIst menempatkan dirinya sebagai aktor diplomasi publik berbasis agama yang unik. Dan kehadiran VoIst membuktikan bahwa lembaga keagamaan mampu menjadi agen perdamaian yang efektif dalam meredam ketegangan identitas global melalui pendekatan *soft power* yang persuasif dan berbasis nilai.

Implementasi Diplomasi Keislaman: Kolaborasi Strategis

Implementasi diplomasi keislaman yang dijalankan oleh Masjid Istiqlal melalui VoIst tidak hanya berhenti pada level wacana, melainkan diwujudkan melalui kolaborasi strategis dalam hal pendidikan dan kebudayaan yang bersifat fisik dan berkelanjutan. Salah satu pencapaian yang paling signifikan dalam hubungan bilateral adalah pembentukan ruang “*China Space*” yang terletak di area perpustakaan Masjid Istiqlal (VoIst, 2026).

Program ini merupakan hasil kerja sama konkret antara VoIst di bawah naungan BPMI dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta. Kehadiran ruang kolaborasi ini menjadi penting di mana institusi keagamaan nasional menyediakan ruang khusus bagi negara mitra untuk melakukan pertukaran informasi budaya dan pendidikan secara langsung di lingkungan masjid.

Berdasarkan temuan penelitian, “*China Space*” dirancang sebagai jendela informasi lintas budaya yang inklusif bagi audiens lokal maupun internasional. Program utama yang diselenggarakan di wadah ini mencakup pelatihan bahasa Mandarin yang dipandu oleh penutur asli (*native speaker*), seminar kebudayaan, hingga bedah buku mengenai hubungan bilateral RI dengan Tiongkok (VoIst, 2025). Melalui aktivitas pendidikan dan kebudayaan ini, VoIst berupaya untuk membangun kapasitas intelektual masyarakat lokal baik beragama Islam maupun non-Islam agar fasilitasi ini tersebar luas secara merata dan pesan moderasi Islam dapat diterima oleh publik dengan berbagai latar belakang dan agama yang berbeda.

Kemudian, kolaborasi ini memungkinkan terjadinya interaksi *people-to-people* yang organik, di mana tamu negara Tiongkok maupun rombongan yang sedang berkunjung ke Istiqlal melalui Kedutaan Besarnya dapat berinteraksi langsung dengan nilai-nilai Islam Indonesia yang ramah, khususnya adanya ruang khusus Tiongkok ada di dalam masjid negara. Sementara, jamaah dan masyarakat Indonesia baik Muslim maupun non-Muslim berkesempatan mempelajari kemajuan Tiongkok dari sisi teknologi dan bahasa. Hasilnya, strategi ini sejalan dengan konsep diplomasi publik yang menempatkan pendidikan dan budaya sebagai alat untuk menarik simpati publik baik asing maupun lokal tanpa melibatkan unsur politik yang bersifat konfrontatif.

Secara analitis, program “*China Space*” mencerminkan strategi *soft power* yang efektif melalui jalur pendidikan dan budaya. Dengan memfokuskan kerja sama pada kedua aspek tersebut, Istiqlal melalui VoIst berhasil menciptakan ruang interaksi yang aman dalam membangun *trust-building* secara bertahap. Dan inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat Islam moderat yang terbuka terhadap peradaban timur, tetapi juga membuktikan bahwa lembaga keagamaan dapat menjadi mitra strategis negara besar dalam mempererat hubungan bilateral melalui pendekatan yang lebih humanis dan intelektual.

Strategi Komunikasi *Soft Messaging* dan Pendekatan Non-Konfrontatif

Dalam mengelola dinamika hubungan dengan Tiongkok, khususnya dalam menyikapi isu sensitif seperti keagamaan, Istiqlal melalui VoIst mengadopsi pendekatan non-konfrontatif sebagai strategi diplomasi utama. Pendekatan ini merupakan metode interaksi untuk menghindari konflik terbuka, tekanan langsung, maupun kritik ofensif dengan mengutamakan pembangunan hubungan jangka panjang melalui dialog dan penghormatan terhadap kedaulatan negara mitra.

Strategi ini diimplementasikan melalui pola komunikasi *soft messaging* yang merupakan penyampaian pesan-pesan keislaman yang persuasif dan edukatif yang menekankan pada nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, dan harmoni sosial. Dengan cara menghindari isu-isu politik yang dapat memicu resistensi, VoIst berhasil memposisikan dirinya sebagai medium komunikasi yang mampu membangun pemahaman lintas budaya tanpa melanggar batas-batas sensitivitas politik pemerintah Tiongkok (The British Academy, 2015).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Besar Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar adalah bagaimana diplomasi ini dilakukan tidak seperti biasanya dilakukan oleh negara, Istiqlal memiliki keunikan dalam diplomasi yaitu dengan cara pengembangan “jalur batin” atau komunikasi spiritual. Diplomasi berbasis spiritual berupaya menyentuh aspek kemanusiaan dan hati masyarakat, di mana dalam pandangan Imam Besar bahwa bahasa agama sering kali lebih efektif untuk memengaruhi persepsi publik daripada bahasa politik, terutama dalam situasi krisis atau konflik identitas global. Dan melalui pendekatan ini, VoIst menciptakan ruang komunikasi yang aman bagi audiens internasional termasuk Tiongkok untuk berinteraksi secara inklusif tanpa merasa terancam secara ideologis.

Implementasi nyata dari strategi non-konfrontatif juga terlihat jelas dalam cara VoIst mengelola isu sensitif mengenai masyarakat Muslim di Xinjiang. Alih-alih memberikan kritik terbuka terhadap kebijakan domestik Tiongkok, VoIst memilih jalur dialog langsung dan pertukaran informasi objektif. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan delegasi dari Xinjiang *Islamic Institute* di ruangan VIP Masjid Istiqlal dan memberikan klarifikasi mengemau kondisi keagamaan di wilayah tersebut.

Selain itu, kunjungan Imam Besar Masjid Istiqlal yang didampingi oleh para pimpinan BPMI ke Xinjiang pada tahun 2023 menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung realitas infrastruktur dan kerukunan umat beragama di sana. Hasil dari interaksi langsung tersebut kemudian disampaikan kembali kepada publik Indonesia guna meluruskan mispersepsi yang selama ini berkembang melalui media luar, sehingga diplomasi ini berfungsi sebagai alat klarifikasi yang berbasis pada pengalaman empiris.

Secara analitis, pilihan untuk bersikap non-konfrontatif tidak berarti mengabaikan isu kemanusiaan, melainkan sebuah bentuk pragmatism normatif. Dalam logika diplomasi *track-two*, hasil dari kerja sama dengan jangka pendek melalui kolaborasi pendidikan dan budaya dianggap mampu untuk membangun momentum positif dan mengurangi ketegangan daripada melakukan konfrontasi yang dapat memicu kebuntuan. Kehati-hatian dalam bertindak dan berucap menjadi prinsip utama bagi VoIst sebagai aktor non-negara, mengingat posisi Indonesia yang tidak condong pada blok kekuatan manapun dan harus menjaga keseimbangan kepentingan nasional. Dengan demikian, strategi *soft messaging* ini telah membuktikan bahwa institusi keagamaan mampu menjadi agen perdamaian yang efektif melalui jalur kebudayaan dan spiritualitas yang lebih halus.

Evaluasi Efektivitas Diplomasi melalui Indikator Kuantitatif dan Kualitatif

Efektivitas diplomasi keislaman yang dijalankan Istiqlal melalui VoIst dapat dinilai melalui perpaduan indikator kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan jangkauan serta kedalaman dampak dari strategi tersebut. Berdasarkan data internal dan hasil wawancara dengan otoritas terkait, keberhasilan ini tidak hanya diukur dari angka statistik kunjungan, tetapi juga dari transformasi persepsi dan terbangunnya kesadaran kolektif mengenai identitas Islam Indonesia di mata masyarakat internasional, khususnya Tiongkok.

Secara kuantitatif, salah satu indikator keberhasilan yang paling menonjol adalah tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Masjid Istiqlal. Data dari Humas Masjid Istiqlal menunjukkan bahwa Republik Rakyat Tiongkok menempati peringkat pertama sebagai asal pengunjung internasional tertinggi. Temuan ini sangat krusial karena mengindikasikan bahwa eksposur visi “*New Istiqlal*” telah sampai ke publik Tiongkok secara masif. Kunjungan fisik ini dipahami sebagai bentuk ketertarikan nyata yang merupakan inti dari *soft power*, dan

dibuktikan bahwa strategi publikasi yang dijalankan VoIst dan dukungan dari Kedutaan Besar Tiongkok yang merekomendasikan Istiqlal sebagai destinasi utama, berjalan secara efektif dalam membangun jembatan interaksi masyarakat (*people-to-people interaction*).

Secara kualitatif, efektivitas diplomasi ini tercermin pada upaya pembangunan kesadaran (*awareness building*) dan perubahan pola pikir (*mindset*) masyarakat. Direktur VoIst, Mulyono Lodji, menekankan bahwa keberhasilan kualitatif diukur dari sejauh mana program-program seperti pelatihan bahasa Mandarin, kaligrafi tulisan Mandarin, dan seminar budaya mampu mengikis asumsi negatif masyarakat terhadap Tiongkok seperti persepsi mengenai negara Tiongkok hanya identik dengan ideologi komunis yang kaku. Sebaliknya, kegiatan-kegiatan di “*China Space*” memperkenalkan sisi humanis, nilai persaudaraan, dan filosofi kebersamaan Tiongkok, sehingga masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka dan saling menghargai.

Dampak dari kualitatif ini juga di validasi oleh audiensi internasional yaitu Ararat Konstanian yang merupakan seorang informan asal Armenia dan pernah menjadi pembicara di salah satu kegiatan VoIst, menyatakan kekagumannya terhadap profesionalisme VoIst dalam mengelola ruang dialog yang modern dan terbuka. Dan menilai inisiatif VoIst dalam mengajak negara-negara mitra untuk membentuk korne-korne per negara seperti *China Space* sebagai langkah visioner yang jarang ditemukan di tempat ibadah lain di dunia. Senada dengan hal tersebut, penulis buku “Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok”, Budi Sugandi menilai bahwa diplomasi VoIst sangat berdampak karena dikelola secara konsisten dan profesional selama dua tahun terakhir, khususnya dalam menjembatani pesan-pesan dari akarya intelektual langsung kepada publik melalui bedah buku dan seminar.

Dengan demikian sinergi antara data kunjungan yang tinggi (kuantitatif) dan penguatan citra positif serta perubahan persepsi (kualitatif) menunjukkan bahwa diplomasi keislaman Istiqlal telah melampaui fungsi tradisional masjid. Istiqlal tidak lagi hanya menjadi tempat ritualitas domestik, tetapi telah menjadi ikon *soft diplomacy* yang efektif dalam membangun *mutual understanding* dan memosisikan Islam Indonesia sebagai rujukan harmoni global di tengah dinamika hubungan bilateral yang kompleks dengan Tiongkok.

Tantangan Struktural dan Hambatan Diplomasi Digital terhadap Tiongkok

Meskipun diplomasi keislaman Masjid Istiqlal melalui VoIst telah menunjukkan berbagai pencapaian positif, efektivitasnya tetap terbentur pada berbagai tantangan struktural dan hambatan teknis yang signifikan. Tantangan utama yang dihadapi dalam menjangkau publik Tiongkok adalah adanya regulasi media digital yang sangat ketat melalui kebijakan yang dikenal sebagai *Great Firewall*.

Pemerintah Tiongkok melakukan pemblokiran sistematis terhadap platform komunikasi global utama seperti *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, dan *WhatsApp*, yang justru menjadi kanal utama bagi VoIst dalam menyebarkan narasi moderasi beragama. Akibatnya, konten digital yang diproduksi oleh VoIst menghadapi kendala aksesibilitas bagi audiens di Tiongkok, sehingga praktik diplomasi digital ini sering kali cenderung bersifat satu arah (*one-way communication*) dan belum optimal dalam menghasilkan interaksi timbal balik yang mendalam dengan masyarakat di sana (Arlado, 2025).

Selain hambatan teknis, perbedaan mendasar pada sistem politik dan pengelolaan agama antara Indonesia dan Tiongkok menciptakan kesenjangan persepsi yang kompleks. Indonesia sebagai negara demokratis memberikan ruang luas bagi ekspresi keagamaan, sementara Tiongkok di bawah sistem satu partai menerapkan kontrol ketat terhadap aktivitas keagamaan guna memastikan kesesuaiannya dengan ideologi negara dan stabilitas nasional.

Kesenjangan ini membuat proses komunikasi menjadi lebih rumit karena VoIst harus sangat berhati-hati dalam menyesuaikan pesan keislamannya agar dapat diterima tanpa memicu sensitivitas politik atau dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap urusan dalam negeri Tiongkok. Strategi *soft messaging* yang diadopsi memang efektif untuk menjaga stabilitas hubungan, namun di sisi lain hal ini membatasi kedalaman interaksi dalam membahas isu-isu yang lebih kritis.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya risiko simbolisme tanpa dampak struktural dalam praktik diplomasi ini. Risiko ini merujuk pada kondisi di mana upaya diplomasi tampak kuat pada level pembentukan citra (*image-building*) dan representasi nilai, namun masih lemah dalam menghasilkan perubahan konkret pada tingkat kebijakan hubungan antar negara atau perbaikan isu-isu struktural yang sensitif. Diplomasi keislaman VoIst sering kali dipandang sebagai upaya “aman” untuk menghindari diskusi mendalam mengenai isu kemanusiaan di

Xinjiang demi mempertahankan hubungan strategis dan ekonomi bilateral. Dalam perspektif kritis, pendekatan non-konfrontatif ini berisiko menjadi bentuk legitimasi halus (*soft legitimization*) terhadap kebijakan otoritas setempat, mengingat keterbatasan aktor non-negara dalam memengaruhi perubahan kebijakan struktural yang bersifat *high politics*.

Kendala internal berupa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam bidang diplomasi internasional di lingkungan Masjid Istiqlal menjadi tantangan tersendiri. Sebagian besar pengelola masih berfokus pada manajemen internal masjid, sementara kebutuhan akan agen diplomasi yang mampu membawa nama Istiqlal ke kancah global secara konsisten masih sangat besar. Dengan demikian, keberhasilan jangka panjang diplomasi ini akan sangat bergantung pada kemampuan Istiqlal melalui VoIst untuk melampaui batasan simbolik dan memperkuat kapasitas institusionalnya di tengah tekanan regulasi digital dan politik global yang ketat.

Kontribusi VoIst dalam Memperkuat Citra Indonesia sebagai Pusat Islam Moderat Dunia

Secara keseluruhan, diplomasi keislaman yang dijalankan oleh Masjid Istiqlal melalui divisi *The Voice of Istiqlal* (VoIst) memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat rujukan Islam moderat (*Islam Wasathiyyah*) di kancah global. Indonesia dengan predikat sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan sistem demokrasi dan pluralisme, serta memiliki modalitas *soft power* yang unik yang tidak dimiliki oleh negara Muslim lainnya.

Melalui transformasi visi "*New Istiqlal*", Istiqlal tidak lagi sekedar menjadi rumah ibadah domestik, melainkan telah bertransformasi menjadi "*The Best Object Icon diplomacy*" yang mempresentasikan identitas Islam Indonesia yang damai, terbuka, dan inklusif kepada dunia internasional.

Kontribusi utama VoIst terletak pada kemampuannya menyuarakan narasi Islam moderat sebagai *counter-narrative* terhadap stigma negatif radikalisme dan Islamofobia yang sering mendominasi persepsi global. Melalui konten digital dan program kolaborasi lintas budaya, VoIst secara aktif mempromosikan nilai-nilai universal seperti keseimbangan (*tawassuth*),

toleransi (*tasamuh*), dan harmoni sosial sebagai manifestasi dari Islam *rahmatan lil 'alamin*. Dalam konteks hubungan RI dengan Tiongkok, narasi ini memberikan alternatif pemahaman bagi audiens di sana bahwa Islam dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan negara dan mendukung stabilitas nasional tanpa kehilangan esensi religiusitasnya.

VoIst juga berperan strategis sebagai wadah diplomasi publik berbasis agama (*faith-based public diplomacy*) yang mampu menjangkau lapisan masyarakat yang sering kali tidak tersentuh oleh jalur diplomasi formal. Keberhasilan pembentukan ruang kolaborasi dengan negara mitra secara fisik seperti “*China Space*” dan “*American Space*” di area perpustakaan Istiqlal membuktikan bahwa VoIst telah berhasil menciptakan ekosistem pusat peradaban yang memfasilitasi interaksi *people-to-people* secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki otoritas moral dan legitimasi spiritual yang kuat untuk membangun kepercayaan (*trust building*) lintas peradaban yang akhirnya memperkuat daya tarik (*attraction*) di mata masyarakat internasional (Hocking, 2005).

Kemudian, sinergi antara tindakan nyata di lapangan seperti dialog lintas iman dan pelatihan bahasa dengan publikasi digital yang masif melalui Instagram, menjadikan VoIst sebagai alat diplomasi yang modern dan profesional. Kehadiran delegasi internasional dan tokoh dunia ke Istiqlal khususnya delegasi Xinjiang untuk menegaskan kondisi yang ada di negaranya secara simbolik menginformasi bahwa model moderasi beragama Indonesia sebagai jembatan dialog antara dunia Islam, Barat, dan Timur.

Secara analitis, keberadaan VoIst mencerminkan pergeseran diplomasi keislaman dari fase normatif menuju fase strategis yang lebih berdampak meskipun masih menghadapi banyak keterbatasan salah satunya SDM di Istiqlal dan regulasi digital yang ada di Tiongkok. Upaya konsisten VoIst dalam membangun komunikasi melalui “jalur spiritualitas” telah berhasil mengikis mispersepsi dan memperkuat pemahaman bersama. Kontribusi ini pada akhirnya menempatkan Masjid Istiqlal sebagai ikon *soft diplomacy* yang efektif dalam menjaga stabilitas hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok melalui pendekatan yang lebih humanis, intelektual, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada era kepemimpinan Nasaruddin Umar periode 2019 hingga 2025 Masjid Istiqlal telah berhasil melakukan reposisi peran dari sekadar rumah ibadah nasional menjadi aktor diplomasi keislaman yang strategis di panggung global. Melalui pembentukan divisi *The Voice of Istiqlal* (VoIst), Masjid Istiqlal menjalankan praktik diplomasi publik dan digital yang berbasis pada nilai-nilai Islam moderat (*Islam Wasathiyyah*) sebagai alat *soft power* Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa diplomasi ini dijalankan dengan pendekatan non-konfrontatif dan *soft messaging* yang mengutamakan terbangunnya komunikasi secara spiritualitas untuk menyentuh aspek kemanusiaan audiens global, melampaui sekat-sekat diplomasi formal yang kaku.

Peran VoIst sebagai aktor non-negara terbukti efektif dalam membangun *mutual understanding* dan memperkuat hubungan antar masyarakat, serta keberhasilan dalam pembentukan ruang kolaboratif seperti “*China Space*” dan penerimaan delegasi dari Xinjiang menjadi bukti nyata bahwa institusi keagamaan mampu menjadi jembatan dialog yang aman dalam mengelola mispersepsi global terkait isu sensitive keagamaan di Tiongkok. Meskipun menghadapi tantangan struktural berupa regulasi media digital yang ketat dan perbedaan sistem politik, diplomasi ini berhasil memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat peradaban Islam moderat yang damai, demokratis, dan inklusif.

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang menjadi acuan bagi pemerintah, Masjid Istiqlal dan pemangku kepentingan diantaranya; (pertama) perlu dilakukan perluasan kolaborasi konkret dengan institusi akademik internasional dan keterlibatan aktif dalam forum internasional guna memperluas dampak substantif dari diplomasi keislaman ini, (kedua) penambahan SDM yang lebih profesional dan memiliki kapasitas yang cukup dalam hal ilmu hubungan internasional agar mampu menjadi duta-duta Istiqlal dalam kontribusinya di forum global dan membawa diplomasi keislaman Istiqlal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawi, A. (2019, July 17). Guangdong Islamic Association jelaskan perkembangan Islam di China. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/guangdong-islamic-association-jelaskan-perkembangan-islam-di-china-dgR5N>
- Arifah, Z. N., & Fabian, R. (2025). Toleransi beragama Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Hukum (SENPISHUM), 1–9.
- Arlado, I. (2025). Saat Platform Global Diblokir, Ini Dia Upaya China Membangun Lingkungan Digitalnya Sendiri. <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-terbaru/2511150012/saat-platform-global-diblokir-ini-dia-upaya-china-membangun-lingkungan-digitalnya-sendiri.html>
- Damayanti, R. (2025). Islam Nusantara and local traditions: Role and challenges in Indonesia's cultural diplomacy and international relations. *Mimbar Agama dan Budaya*, 42(1), 1–13.

- Hocking, B. (2005). Rethinking the “new” public diplomacy. In J. Melissen (Ed.), *The new public diplomacy: Between theory and practice*. Palgrave Macmillan.
- Hsieh, C.-M. (2026, January 30). History of Xinjiang. Encyclopaedia Britannica. <https://www.britannica.com/place/Tarim-Basin>
- Human Rights Watch. (2005, April 11). China: Religious repression of Uighur Muslims. <https://www.hrw.org/report/2005/04/11/devastating-blows/religious-repression-uighurs-xinjiang>
- JIC. (2018, April 13). Jejak peradaban Islam di negeri Tirai Bambu. Jakarta Islamic Centre. <https://islamic-center.or.id/jejak-peradaban-islam-di-negeri-tirai-bambu/>
- Joseph S. Nye, Jr. (1990). Soft power. *Foreign Policy*, 80, 153–171.
- Lee, R. (2015). Muslims in China and their relations with the state.
- Melissen, J. (2005), *The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan, London.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage, 338.
- Montville, J. V. (2006). Track two diplomacy: The work of healing history. *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, 15–25.
- NU Online (2019). Sejarah Berdirinya Masjid Istiqlal. <https://ns1.nu.or.id/fragmen/sejarah-berdirinya-masjid-istiqlal-Ae86E?>
- Oktavia, E. M. (2023). Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia: Kebijakan Indonesia terhadap China dalam penyelesaian konflik etnis Uighur. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6(2), 130–145.
- Raba, W. J. (2025), Istiqlal Mosque: Southeast Asia's Largest Mosque and a Symbol of Unity. <https://seasia.co/2025/05/16/istiqlal-mosque-southeast-asias-largest-mosque-and-a>
- The British Academy (2015). *The Role of Religion in Conflict and Peacebuilding*. The British Academy, London.
- Theys, S. (2018, February 23). Introducing constructivism in international relations theory. *E-International Relations*, 1–4.
- VoIst. (2023). The role of community in strengthening civil society and countering violent extremism. <https://voist.istiqlal.or.id/article/detail/the-role-of-community-in-strengthening-civil-society-and-countering-violent-extremism>

- VoIst. (2023). Democracy and peace: The role of Indonesian youth in promoting peace and democracy. <https://voist.istiqlal.or.id/article/detail/democracy-and-peace-the-role-of-indonesian-youth-in-promoting-peace-and-democracy>
- (2025, July 2). The Voice of Istiqlal bedah buku berjudul “Mengarungi jejak merajut asa: 75 Indonesia–Tiongkok” dalam rangka memperingati 75 tahun diplomasi Indonesia–Tiongkok. <https://voist.istiqlal.or.id/article/detail/the-voice-of-istiqlal-bedah-buku-berjudul-mengarungi-jejak-merajut-asa-75-indonesia--tiongkok-dalam-rangka-memperingati-75-tahun-diplomasi-indonesia--tiongkok>
- VoIst. (2026). The Voice of Istiqlal-Mandarin Language Seminar with China Embassy. <https://voist.istiqlal.or.id/article/detail/the-voice-of-istiqlal-mandarin-language-seminar-with-china-embassy>.